

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

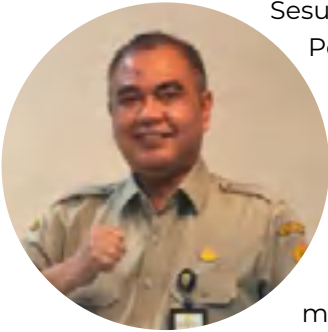
RENCANA STRATEGIS 2020-2024





**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024. Tahun 2020-2024 merupakan periode yang cukup strategis dalam rangka menyongsong tahun 2045 yang diprediksikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia Tahun 2042. Pada saat itu, PDB Indonesia telah mencapai 9,1 juta US\$ dan pendapatan/kapita Rp. 27 juta/tahun serta penduduk berjumlah 310 juta jiwa.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari sektor pertanian akan mengikuti terus perubahan-perubahan yang akan terjadi terutama perubahan kebijakan dan teknologi. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis ini sangat penting untuk menjadi bagian dari Rencana Strategis pemerintah dan sektor pertanian. Rencana Strategis Ditjen PKH ini telah disusun menurut *outline* yang diberikan sehingga telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan 8 agenda Program Prioritas (PP). Dengan demikian, penyusunan visi, misi, strategi dan arah kebijakannya menjadi bagian dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pemerintah dan sub sektor peternakan. Diharapkan dengan disusunnya Renstra Ditjen Peternakan 2020-2024, dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal,



Nasrullah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Kinerja Ekonomi Makro.....	2
1.1.2. Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	9
1.2.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang).....	9
1.2.2. Permasalahan.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	17
2.1. Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan...	17
2.2. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan..	18
2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	20
2.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (SP dan IKSP).....	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	33
3.2. Dukungan Peternakan dan Keswan dalam Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Nasional.....	37
3.3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....	38
3.3.1. Kerangka Regulasi.....	38
3.3.2. Kerangka Kelembagaan.....	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1. Target Kinerja.....	43
4.2. Kerangka Pendanaan.....	44
BAB V PENUTUP.....	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan	19
Tabel 2.2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program	24
Tabel 3.1	Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH	27
Tabel 3.2	Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH	31
Tabel 3.3	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi	34
Tabel 4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	3
Gambar 3.1	Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)	26
Gambar 3.2	Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH	37





DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 adalah unit kerja Eselon I yang berada dibawah Kementerian Pertanian, sesuai bagian ketujuh Pasal 20, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal PKH, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa susunan organisasinya terdiri dari satu orang Eselon I A, 6 orang Eselon II A, 26 orang Eselon III A, dan 61 orang Eselon IV A. Fungsi dari Ditjen PKH tersebut dirumuskan menjadi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Selain itu, Ditjen PKH berfungsi untuk pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Renstra Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, diwajibkan kepada Ditjen PKH untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJMN).

Renstra Ditjen PKH sebagai pijakan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020-2024, yang juga menggambarkan



secara utuh capaian kinerja pembangunan sebelumnya yakni : capaian kinerja makro maupun kinerja teknis. Kinerja makro, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sedangkan kinerja teknis berupa populasi, produksi dan tingkat konsumsi sebagai cerminan pelaksanaan kinerja fungsional yaitu aspek perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta dukungan kesekretariatan.

1.1.1 Kinerja Ekonomi Makro

1. Produk Domestik Bruto

PDB sub sektor peternakan pada periode 2014-2018** menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB sektor pertanian. PDB sub sektor peternakan tahun 2014 mencapai sebesar Rp.132.221,1 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.155.152,2 miliar atau meningkat 4,08% pertahun sedangkan PDB sektor pertanian Rp.880.389,5 miliar meningkat menjadi Rp. 1.005.440,8 miliar atau meningkat sebesar 3,37% pertahun (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).-

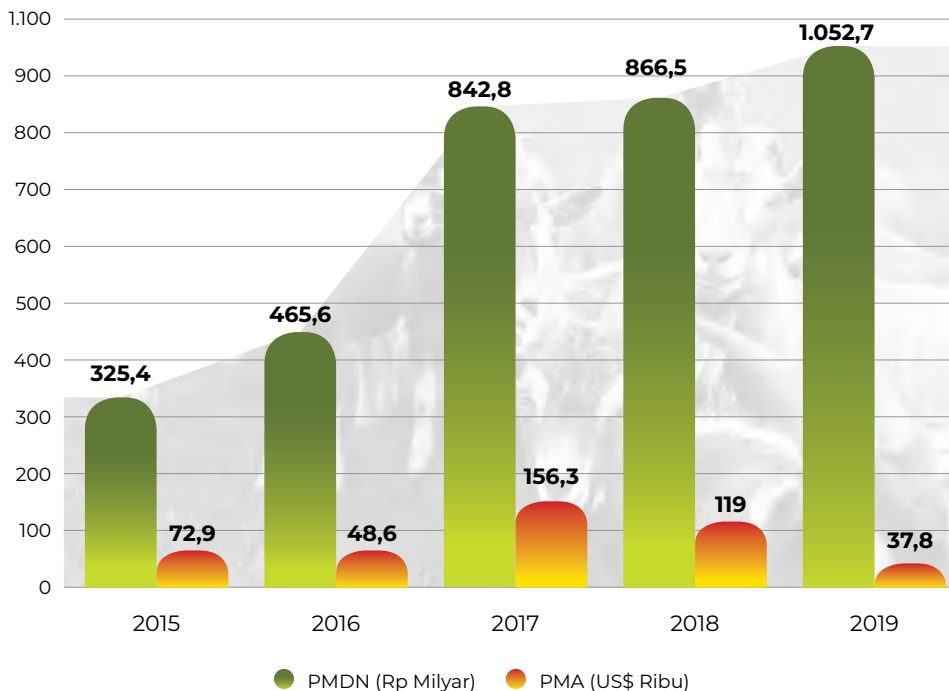
2. Investasi

Investasi sub sektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp.326,4 miliar menjadi Rp.1.503,2 miliar secara kumulatif meningkat sebesar Rp.726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%.

Sebagai gambaran investasi sektor peternakan periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



KINERJA INVESTASI SUBSEKTOR PETERNAKAN



Gambar 1.1 Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam periode tahun 2014-2018, penyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan meningkat 4,18 pertahun, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.831.211 orang pada tahun 2018 (BPS, Sakernas-Februari). Berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja peternakan di dominasi oleh tenaga berpendidikan SD yaitu sebanyak 1.610.057 orang (33,3%), dengan kelompok umur yang didominasi oleh golongan umur tua (60 tahun ke atas) sebanyak 1.132.175.orang (23,75 %) dan apabila dilihat dari status pekerjaan utamanya adalah pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 1.736.149 orang (36,43 %) (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019)

4. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) periode 2019 sebesar 108,04 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 106,65. NTPT lebih dari 100 menunjukkan peternak mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,26% (Sumber: BPS Tahun 2020).

1.1.2 Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Populasi Ternak

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak periode 2015-2019 terbesar yaitu ayam ras pedaging (23,39%) dan ayam ras petelur (18,41%), Untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,66% dan 2,05%. Untuk ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba dan babi masing-masing tumbuh 0,02%; 1,29% dan 3,44%. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kerbau -1,65% dan kuda -2,14% (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).

2. Produksi Ternak

Berdasarkan pertumbuhan produksi ternak periode 2015-2019, jumlah produksi daging ayam ras pedaging mendominasi dengan rata-rata pertumbuhan 23,39% pertahun. Sedangkan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,75% dan 9,20%. Untuk rata-rata pertumbuhan telur ayam ras petelur, ayam buras dan susu masing-masing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 4,56% (Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2019).

Sesuai dengan Renstra tahun 2014-2019, produksi ternak yang tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu telur sebesar 5.355,6 ribu ton (capaian 140,44%) dari target 3.770 ribu ton sedangkan target produksi ternak yang tidak tercapai yaitu: daging sapi/kerbau sebesar 514,4 ribu ton (capaian 68,13%) dari target 755 ribu ton dan susu sebesar 996,44 ribu ton (capaian 93,69%) dari target 1.063,56 ribu ton.



Dari aspek konsumsi, konsumsi daging sapi menunjukkan bahwa konsumsi daging selama 2014-2018 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2014 konsumsi tersebut disetarakan dengan protein hewani menunjukkan 2,68 gram protein. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 3,73 gram protein/hari/kapita dan telur pada periode yang sama naik 3,17 gram/kapita/hari menjadi 3,5 gram/kapita/hari (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2019).

3. Sertifikasi Bibit Ternak

Produksi benih dan bibit selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut : 1) Produksi benih : sebanyak 24.117.522 dosis atau 100,39% dari target 24.023.00 dosis untuk semen beku dan 5.495 embrio atau 171,62% dari target 3.202 embrio; dan 2) Produksi bibit : sapi potong sebanyak 4.522 ekor atau 114,37% dari target 3.954 ekor; sapi perah 1.467 ekor atau 122,25% dari target 1.200 ekor; kerbau 293 ekor atau 48,03% dari target 610 ekor; kambing perah 764 ekor atau 132,87 % dari target 575 ekor; kambing 1.209 ekor atau 104,68% dari target 1.155 ekor; babi 2.782 ekor atau 70,50% dari target 3.946 ekor; ayam 1.249.429 ekor atau 132,90% dari target 940.100 ekor; serta itik 2.169.993 ekor atau 133,53% dari target 1.625.057 ekor (Lakin Bitpro 2019 data diolah).

Selain produksi benih dan bibit, kinerja perbibitan dan produksi ternak juga dapat dilihat dari sertifikasi bibit yang dikeluarkan sebanyak 312 ekor sapi potong, 103 ekor kambing, 110 ekor domba, 2.755.000 straw semen beku dan 22 ekor babi. Selama kurun waktu tersebut ada sebanyak 16 rumpun galur ternak yang telah dikeluarkan (Lakin Bitpro 2019 data diolah)

4. Status Kesehatan Hewan

Upaya mendukung kegiatan status kesehatan hewan melalui pembebasan penyakit. Dalam periode 2015-2017 telah dilakukan pembebasan terhadap 14 wilayah untuk penyakit Rabies, AI, Brucellosis dan Septicemia Epizootica. Capaian kinerja status kesehatan hewan pada tahun 2019 sebesar 78,1% dari target 80%.



Capaian status kesehatan hewan dibawah target dikarenakan beberapa hal antara lain: (1). Adanya wabah Rabies di beberapa lokasi di Provinsi NTB; dan (2). Adanya penurunan jumlah provinsi bebas rabies semula 9 Provinsi menjadi 8 Provinsi karena Provinsi NTB sebelumnya merupakan wilayah bebas Rabies

Disamping itu, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 87 kompartmen bebas AI untuk Breeding Farm aktif, yaitu: sebanyak 9 perusahaan GPS (Grand Parent Stock, 39 Perusahaan PS (Parent Stock), 18 perusahaan FS (Final Stock), 21 perusahaan Hatchery di 14 provinsi (Lakin Ditjen PKH 2019).

5. Penjaminan Keamanan Pangan Strategis Nasional

Upaya Penjaminan Produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan dilaksanakan melalui serangkaian upaya mulai dari pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi unit usaha dan produk hewan. Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus berasal dari unit usaha yang telah menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Selanjutnya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan, dan guna mendorong pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang diproduksi, dimasukkan dari dan/atau dikeluarkan ke luar negeri, dan yang diedarkan didalam negeri, juga dilakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan, pengawasan peredaran produk hewan serta monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan.



Sampai dengan tahun 2019, terdapat unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV sebanyak 2.453 unit usaha, meningkat 233 unit usaha dari tahun 2018 sebanyak 2.020 unit usaha. Sedangkan untuk jumlah kasus pangan segar asal hewan yang membahayakan kesehatan manusia terjadi penurunan kasus, dari 16 kasus di tahun 2018 menjadi 10 kasus di tahun 2019.

Terkait dengan monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan, telah dilakukan pengujian terhadap 30.745 sampel produk hewan, dengan hasil sebanyak 81% produk hewan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu dalam upaya memenuhi persyaratan kesehatan produk hewan untuk ekspor, pada tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak 3.439 Sertifikat Veteriner, yang meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3.332 Sertifikat Veteriner. Peningkatan penerbitan sertifikat veteriner ini menunjukkan bahwa produk hewan asal Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor dan berdaya saing (Lakin Ditjen PKH 2019).

6. Penyediaan Infrastruktur Peternakan

Penyediaan infrastruktur peternakan tahun 2015-2019 diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana RPH-Ruminansia dan tempat pemotongan hewan kurban. Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yaitu RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit dengan pertimbangan bahwa RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban tersebut dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak ditargetkan sebesar 30%. Adapun realisasi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar 34,60% dari target 30% (tersedia sebanyak 178 unit) (Lakin Ditjen PKH 2019).



7. Peningkatan Volume ekspor

Capaian kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun 2019 sebesar 78,65 % atau meningkat 314,60 % dari target 25 % dan bila dilihat secara volume, ekspor tahun 2019 sebesar 32.491,14 ton meningkat dari tahun 2018 sebesar 29.145,04 ton. Apabila dilihat dari nilainya, ekspor hewani asal ternak tahun 2019 sebesar US\$ 78.654.179,58 meningkat dari tahun 2018 sebesar US\$ 71.190.478,16 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 62,92% (Lakin Ditjen PKH 2019).

Volume ekspor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari volume ekspor 7 (tujuh) komoditas, yaitu: ternak kambing, domba, babi, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick – DOC*), serta obat hewan. Ekspor ternak babi selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,83% per tahun.

Ekspor ternak kambing dan domba selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan untuk ternak kambing (95,85%) sedangkan ternak domba baru mulai diekspor pada tahun 2018 sebesar 81,5 ton. Telur ayam tetas, daging ayam dan produk olahannya serta obat hewan merupakan komoditas yang berkontribusi terhadap peningkatan volume ekspor pada tahun 2015-2019. Sedangkan DOC baru diekspor pada tahun 2018-2019 dengan tujuan ekspor adalah Timor Leste.

8. Penurunan Volume Impor

Volume impor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari 9 (sembilan) komoditas, yaitu: susu, mentega, keju, yoghurt, sapi hidup, daging lembu, jeroan lembu, sosis, dan itik. Pada periode dua tahun (2018-2019), penurunan impor terjadi pada dua komoditas, yaitu itik dan yoghurt. Untuk komoditas daging lembu dan jeroan lembu, serta susu dan kepala susu belum mampu menurunkan volume impor dikarenakan meningkatnya kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri. Selain itu, penyebab adanya peningkatan impor daging dan jeroan juga



karena ada perubahan regulasi untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan WTO (*World Trade Organization*).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk melihat potensi dan permasalahan pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilihat dari faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan peternakan. Lingkungan strategis internal mencakup aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal mencakup aspek ancaman dari luar dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis dengan metode SWOT, untuk memilih aspek aspek internal dan eksternal strategis untuk dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif strategi prioritas dalam mendukung kinerja pembangunan.

1.2.1. Potensi (Kekuatan dan peluang)

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain: jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman hayati, teknologi dan pasar luar negeri

1. Jumlah Rumah Tangga Peternakan 13,56 juta orang (Sutas, 2018)
Peternakan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia secara turun menurun. Usaha peternakan dilakukan oleh masyarakat secara polivalen (terpadu) dengan kegiatan ekonomi lainnya di bidang pertanian. Dengan banyaknya masyarakat melakukan usaha peternakan walaupun dengan skala yang kecil dan dikelola secara sambilan, usaha peternakan ini memiliki peran dalam menopang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga peternakan sebanyak 13,56 juta rumah tangga atau sebesar 21,43% dari rumah tangga pertanian.
2. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar diwilayah-wilayah belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam menghasilkan

produk-produk peternakan. Dukungan sumber daya alam lainnya, utamanya dalam penyediaan pakan untuk pertumbuhan ternak sangat besar dengan keragaman yang cukup tinggi. Disamping itu, keragaman budaya dari masyarakat yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk pangan hasil ternak yang merupakan kekuatan penyediaan terhadap produk peternakan. Potensi ragamnya genetik ternak dan produk olahan asal ternak dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

3. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia.
Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stabilisator merupakan modal penting dalam menubuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan utamanya bagi peternak rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan peternakan Indonesia.

Untuk itu peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan peternakan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian peternak. Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan cara: menciptakan iklim usaha yang memungkinkan peternak berkembang; meningkatkan kemampuan peternak melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan menciptakan kemitraan peternakan yang saling menguntungkan

4. Pangsa Pasar ekspor produk peternakan meningkat
Pada periode 2015-2019, beberapa produk ternak mengalami peningkatan produksi antara lain daging ayam ras pedaging (23,39%), telur ayam ras petelur, ayam buras, daging kambing



meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 20,78. Kelebihan produksi ini dapat dijadikan peluang ekspor keluar negeri. Peluang ekspor semakin terbuka dengan status kesehatan hewan yang dimiliki Indonesia yaitu bebas penyakit list A (PMK). Peluang ekspor kambing dan domba sangat potensial mengisi segmen pasar di Asia dan Timur Tengah ditopang dengan keunggulan komparatif yang ada.

5. Kesadaran global tentang keamanan pangan (*food safety*), *bio security* dan kesejahteraan hewan
Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. Pemerintah dan pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan pangan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan pangan yang aman dan berkualitas, penerapan cara yang baik di rantai produksi pangan termasuk penerapan kesejahteraan hewan menjadi faktor penting yang harus dilaksanakan.

1.2.2. Permasalahan

1. Usaha peternakan yang bersifat Subsiten dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak
Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak.

Hasil SOUT 2017 menyebutkan bahwa partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan hanya sebesar 5,65 %, dan dari jumlah tersebut 7,86% adalah peternak sapi potong. Informasi terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak. Sebanyak 82.13% peternak tidak mengikuti penyuluhan dan bimbingan teknis usaha peternakan dimana 79,73 % adalah peternak sapi potong. Alasan dominan peternak tidak mengikuti bimbingan dan penyuluhan usaha peternakan adalah peternak merasa tidak perlu dengan materi penyuluhan yang diberikan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan karena tanpa adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan ternak dan pengelolaan usaha peternakan melalui kegiatan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis dan manajemen usaha maka risiko ketidakberhasilan kegiatan harus dapat segera dimitigasi.

2. Rendahnya pemanfaatan plasma nutfah sebagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan secara ekonomis.
Indonesia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah ternak yang tersebar di wilayah Indonesia, namun keunggulan komparatif ini belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk didorong sebagai keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan pengembangan dan kontribusi plasma nutfah ternak Indonesia, dapat dilakukan pengembangan dan perbaikan mutu genetic secara terus menerus, sekaligus dikembangkan secara ekonomis melalui kawasan sumber bibit ternak.
3. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan.
Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk



penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

4. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan dan liberalisasi pasar

Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Persaingan dan liberalisasi berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi sehingga arus informasi dan transportasi ke negara lain semakin dekat, terutama masuknya barang-barang luar negeri. Selain itu, Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor hasil ternak terutama daging sapi, ternak hidup, dan bibit ayam ras. Dari sisi industri, Indonesia mengimpor kulit ternak, bahan baku pakan asal ternak seperti meat meal dan bone meal, tepung ikan, jagung dan berbagai feed suplement pakan ternak. Ketergantungan bahan utama industri dari impor ini sangat mempengaruhi perkembangan peternakan dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketergantungan impor produk peternakan, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.

5 Lemahnya Posisi dalam Perjanjian Internasional

Terbukanya pasar global harus disertai persiapan yang matang terutama perjanjian internasional utamanya dalam hal perdagangan atau arus barang. Perjanjian yang tidak disikapi dengan matang dan lemahnya posisi tawar akan mengancam industri peternakan dalam negeri dan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO) harus mengantisipasi fenomena dan dinamika perkembangan internasional maupun regional terutama dalam bidang perdagangan hewan dan produknya

melalui reorientasi terhadap kebijakan perdagangan dengan memfokuskan perhatian terhadap salah satu aspek yang sangat penting dari perjanjian GATT yaitu “Perjanjian tentang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan” (Sanitary and Phytosanitary/ SPS).

Dari aspek kesehatan hewan, meningkatnya lalu lintas hewan dan produknya akan membawa risiko masuknya penyakit hewan ke wilayah Indonesia. Indonesia yang telah dinyatakan bebas terhadap 13 dari 15 penyakit hewan menular menurut daftar A dan beberapa penyakit menurut daftar B dari OIE (*Office Internationale des Epizooties*) perlu mengantisipasi melalui reorientasi kebijakan dengan menepati kesepakatan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* untuk keamanan pangan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan.





DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1. VISI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya, harus selaras dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2020-2024, untuk visi yaitu :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan:

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.

Visi Ditjen PKH bermakna:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan sub sector peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu mengantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat



3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

2.2. MISI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.



3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara.

Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional.

Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan system logistic, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Misi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian.

2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup :

1. Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi. Untuk itu kualitas, kuantitas dan



kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumberdaya lokal harus dapat diwujudkan dengan baik. Upaya untuk penyediaan bibit dan benih ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik secara teknis maupun manajerial.

2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting didalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, murah dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan pakan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya kesehatan hewan

Peningkatan kesehatan hewan ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (zoonosis).

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Produk peternakan baik pangan maupun non pangan harus mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari luar, untuk itu peningkatan kualitas dan daya saing produk harus dapat diwujudkan. Disamping untuk penyediaan dalam negeri diharapkan produk peternakan juga mampu diekspor untuk pasar luar negeri. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk dilakukan melalui peningkatan SDM, pemenuhan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi modern mulai dari proses pengolahan sampai distribusi pemasaran.

6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, maka perbaikan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek kelembagaan, SDM, tata kelola aset, kebijakan, program dan penganggaran akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.

Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator tujuan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas bibit/ benih ternak secara berkelanjutan	1. Tersedianya bibit/ benih ternak berkualitas dan berkesinambungan	1. Jumlah bibit/benih ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat)
	2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pakan secara berkelanjutan	2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan	2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas (indeks)
	3. Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kesehatan hewan	3. Status Kesehatan Hewan (%)
Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan	4. Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat	4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional	4. Jaminan kesehatan masyarakat veteriner (%)
	5. Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	5. Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
	6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai <i>roadmap</i> RB Kementan	6. Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif
			7. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks)

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan misi serta tujuannya merupakan mata rantai yang saling mendukung. Untuk mencapai visi dimaksud maka misi yang dibebankan kepada Ditjen PKH dan tujuan yang diinginkan beserta indikator tujuannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.4. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (SP DAN IKSP)

Berdasarkan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH memiliki Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah terbentuknya program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama kurun waktu 2020-2024 dan program tersebut memiliki kegiatan. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based*). Adapun berbagai sasaran program tersebut adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak.

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

Target capaian produksi kurun waktu 2020-2024 dengan peningkatan untuk produksi daging (4,99%); susu (4,30%), dan telur (2,11%) dan target produksi masing-masing komoditas setiap provinsi dapat di Lampiran 1. Dengan rata-rata pertumbuhan daging tersebut maka sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN baik target produksi dan kontribusi angka kecukupan protein hewani dapat tercapai.

2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan, adanya penurunan volume impor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.

Kinerja Keamanan dan Mutu Pangan diukur berdasarkan persentase



pangan asal hewan (definisi hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya indeks keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan “halal” (definisi ASUH) (SP3 dan SS3).

4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari indeks ketersediaan sarana peternakan yang sesuai peruntukan. Meningkatnya indeks ketersediaan sarana dari hulu sampai hilir dalam sistem produksi ternak diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.

Sasaran program ini indikatornya adalah rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia

Sasaran program ini adalah terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dengan indikator kinerja jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dapat mencapai sasaran strategis yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

7. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai RB Ditjen PKH dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen PKH yang dilihat dari berapa nilai dari skala *likert*. Pencapaian nilai RB dan indeks kepuasan masyarakat dengan sasaran program

mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan

8. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Dirjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan

Manual Indikator Sasaran Program dan Kegiatan akan disusun lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Renstra PKH tahun 2020-2024.

Sasaran program dan indikator program level 1 secara rinci disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SP1. Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak							
1	Produksi daging (ribu ton)	4.499,32	4.714,88	4.939,55	5.177,04	5.439,29	5.786,62
2	Produksi susu (ribu ton)	996,44	1.041,31	1.088,20	1.137,20	1.188,41	1.241,93
3	Produksi telur (ribu ton)	5.355,66	5.470,94	5.588,88	5.709,57	5.833,06	5.959,43
SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan							
4	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%)	284.349 ton	25	33,75	47,25	68,51	137,03
SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak							
5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	80	81,5	82	82,5	83	83,5
SP4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan							
6	Indeks ketersediaan sarana peternakan yang sesuai peruntukan (indeks)	15,7	17,7	20,9	25,4	31,2	38,4
SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan							
7	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (%)	80	80	80,5	80,5	81	81
SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia							
8	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus)	125	127	125	123	121	119
SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
9	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	22,01	22,43	22,64	22,85	23,06	23,27
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4))	3,4	3,57	3,58	3,59	3,59	3,6
SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas							
11	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85





DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (termasuk sub sektor peternakan) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1).
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2).
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4).
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).mperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelay

RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara

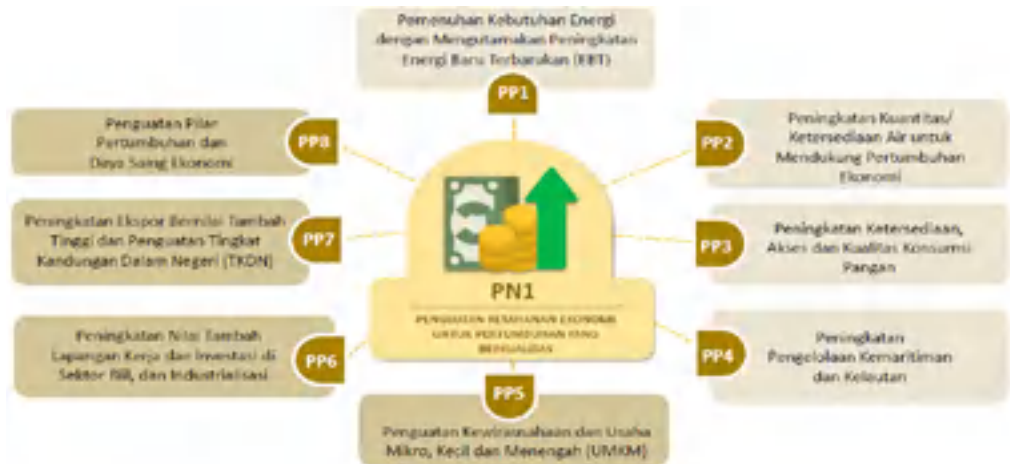


BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

(BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga Project Major diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
2. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

Prioritas Nasional (PN) kemudian diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, pada Gambar 3.1 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)

Berdasarkan Gambar 3.1, Program Prioritas (PP) yang menjadi kontribusi penting Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (PP6). Ditjen PKH akan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional 1 (PN 1) dengan Program Prioritas 3 (PP3) dan Program Prioritas 6 (PP6)



PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan Program Prioritas (PP3): Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan secara nasional mempunyai indikator dan target sebagai berikut:

- a. Skor Pola Pangan Harapan : 2020 (90,4%) dan 2024 (95,2%)
- b. Angka kecukupan protein (AKP) sebesar 57 g/kapita/hari selama tahun 2020-2024.
- c. Produksi daging: 2020 (4,1 juta ton) dan 2024 (4,6 juta ton)
- d. Konsumsi daging: 2020 (13,5 kg/perkapita/tahun) dan 2024 (14,7 kg/perkapita/tahun)
- e. Konsumsi protein asal ternak: 2020 (10,7 gram/kap/hari) dan 2024 (11,0 gram/kap/hari)
- f. Ketersediaan protein hewani: 2,5 juta ton (2020) dan 2,9 juta ton (2024)

Selain itu, kontribusi Ditjen PKH terhadap PN 1 juga menyangkut meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor dan daya saing perekonomian terkait dengan PP 6, yaitu Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor riil dan industrialisasi. Indikator dan targetnya yaitu pertumbuhan PDB pertanian : 2020 (3,5%) dan 2024 (4,0-4,1%).

Kontribusi Ditjen PKH terhadap PP, KP dan Indikator RPJMN (PP Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian) disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 . Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH

PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP)	Sasaran Program dan	
INDIKATOR RPJMN	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
PP3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	
Skor Pola Pangan Harapan	1	Produksi daging (juta ton): 4,7 (2020) dan 5,7 (2024)
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/ hari)	2	Produksi susu (juta ton): 1,04(2020) dan 1,24 (2024)
KP 1 . Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	3	Produksi telur (juta ton):5,47 (2020) dan 5,96 (2024)
Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun)	SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan	
Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,0 gram/ kap/hari)	4	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%): 2,3 (2020) dan 42 (2024)
KP 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	
Produksi Daging (juta ton)	5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%):81,5 (2020) dan 83,5(2024)
Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton)	SP4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	
KP 3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian	6	Indeks ketersediaan sarana peternakan yang sesuai peruntukan (indeks):17,7(2020) dan 38,4 (2024)
Nilai Tukar Petani	SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	
KP 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian	7	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (%):80(2020) dan 81 (2024)
Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Akses)	SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	
KP 5. Peningkatan tata nasionalkelola sistem pangan	8	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus): 127(2020) dan 119 (2024)
Global food security index	SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	
	9	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 22,43 (2020) dan 23,27 (2024)
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)): 3,57 (2020) dan 3,6(2024)
	SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	
	13	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 88,25 (2020) dan 90,85 (2024)



Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian akan berperan untuk ketersediaan protein hewani, peningkatan produksi daging, keamanan pangan asal ternak, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan : visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises.**

Good Breeding Practises dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. **Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan**

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang



dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan



pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Kementan maka posisi Ditjen PKH dapat dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 3. 2 Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH

No	Arah kebijakan dan Strategi Kementan	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH
1	Terjaganya ketahanan pangan nasional. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian;2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;	Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.2. Penyediaan pakan yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan berbasis bahan pakan lokal.3. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia2. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.
2	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan nilai tambah2. Peningkatan daya saing pertanian	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hewan. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Pengolahan distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.2. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
3	Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan impelementasi manajemen ASN2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja4. Transformasi pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Dari Tabel 3.2 nampak bahwa arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH mendukung dan sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Ada 4 arah kebijakan dengan 9 strategi Ditjen PKH sebagai landasan dalam pembangunan Tahun 2020-2024.



3.2. DUKUNGAN PETERNAKAN DAN KESWAN DALAM PENGARUSUTAMAAN DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL

3.2.1. Pengembangan Korporasi

Korporasi peternak dibangun melalui pemberdayaan peternak dengan mengkonsolidasikan peternak dalam suatu kelembagaan petani/peternak (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan ekonomi. Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani/peternak karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan

Amanah RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu Proyek Nasional (Major Project) untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani/peternak, kegiatan ini akan dikembangkan di 1.029 klaster komoditas pertanian (termasuk peternak) dengan jumlah korporasi petani yang dikembangkan sebanyak 350 unit dan untuk peternakan ditargetkan sebanyak 100 unit. Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Pengembangan korporasi peternak dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan diseconomic-externality yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakekatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi peternakan. Pengembangan kawasan komoditas peternakan dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang

diantaranya menetapkan kawasan komoditas prioritas peternakan di seluruh kabupaten

3.3. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.3.1.Kerangka Regulasi

Aspek regulasi dimaksudkan sebagai kebutuhan regulasi yang harus diadakan selama kurun waktu 2020-2024. Kebutuhan ini dapat berupa penambahan regulasi ataupun penyederhanaan dan penghapusan untuk menjalankan penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Berdasarkan definisi diatas maka perencanaan regulasi dapat mempengaruhi implementasi arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan akhir organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut ini kerangka regulasi yang diperlukan untuk Ditjen PKH sebagai berikut:

Tabel 3.3 . Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi

Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi dan Urgensi kerangka regulasi		Keterangan
1. Rancangan Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Permentan No. 13/2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi
2	Permentan No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan	
3	Permentan No. 127/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
4	Permentan No. 51/2011 tentang Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak)	
2. Rancangan Permentan tentang Pengawasan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Permentan No. 74/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi
2	Permentan No. 65/2008 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	
3	Permentan No. 42/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak	
4	Permentan No. 14/2008 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	
5	Permentan No. 15/2008 tentang Monitoring dan Surveilans, Residu dan Cemaran Mikroba pada Hewan	
6	Permentan No. 45/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar	
7	Permentan No. 35/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif	



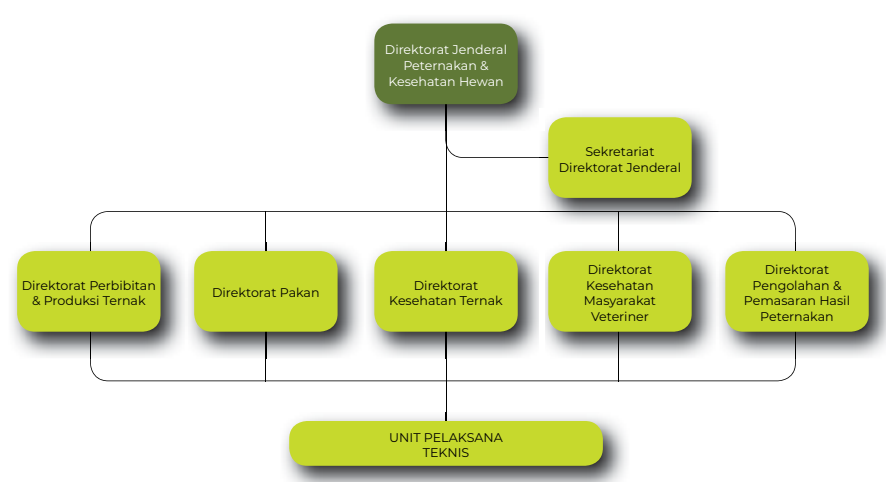
Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi dan Urgensi kerangka regulasi		Keterangan
3. Rancangan Permentan tentang Standar dan Sertifikasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Kepmentan No. 240/2003 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Kepmentan No. 446/1999 tentang Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik	
3	Permentan No. 114/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban	
4	Permentan No. 45 tahun 2007 tentang Klasifikasi Laboratorium	
5	Permentan No. 13/2010 tentang RPH Ruminansia dan Meat Cutting Plan	
6	Permentan No. 38/2015 tentang Tata Cara Produksi Kopi Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan	
7	Permentan No. 19/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih/Bibit Ternak dan SDGH	
8	Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran Pakan	
9	Kepmentan No. 695/1996 tentang Pendaftaran Obat Hewan jo. Kepmentan 455/2000 tentang Perubahan Obat Hewan	
4. Rancangan Permentan tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Kepmentan No. 4040/2002 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Permentan No. 18/2009 tentang Izin Usaha Obat Hewan	
5. Rancangan Permentan tentang Nilai Tambah dan Daya Saing bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Penambahan substansi: pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, kemitraan hasil peternakan, dan pengembangan usaha peternakan. Merupakan pengganti dari: Permentan No. 13/2017 tentang Kemitraan Hasil Peternakan	Penambahan substansi
6. Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Penambahan substansi: penyediaan, peredaran ternak dan produk hewan; penyediaan dan peredaran obat hewan; penyediaan dan peredaran pakan; penyediaan dan peredaran susu	Penambahan substansi
7. Rancangan Permentan Program Kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Permentan Bekerja (Permentan No. 14/2019)	Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Permentan No. 48 tahun 2016 tentang UPSUS SIWAB	
3	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat 7 rancangan regulasi yang akan disederhanakan maupun penambahan substansi. Ketujuh regulasi tersebut dibuat untuk menyederhanakan 27 regulasi yang ada saat ini dalam rangka bagian dari penataan peraturan perundang-undangan dan adanya arahan Presiden.

3.3.2.Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pementapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi.

Organisasi Ditjen PKH sesuai dengan prinsip *Structure Follow The Strategy* memerlukan kerangka kelembagaan yang menyesuaikan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tata laksana yang baik diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Ditjen PKH tahun 2020 – 2024.



Gambar 3.2. Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH

Dari Gambar 3.2 Ditjen PKH didukung oleh 6 unit kerja setingkat eselon II. Sebanyak 5 (lima) unit kerja menjalankan fungsi teknis, meliputi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; Direktorat Pakan; Direktorat Kesehatan Hewan; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Sementara fungsi manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Ditjen PKH juga dilengkapi dengan 22 UPT yang terdiri dari a) Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya; b) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan; c) Balai Besar Veteriner Wates; d) Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros; e) Balai Besar Veteriner Denpasar; f) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturaden; g) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari; h) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang; i) Balai Embrio Ternak Cipelang; j) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor; k) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP); l) BVet Medan; m) BVet Bukittinggi; n) BVet Bandar Lampung; o) BVet Subang; p) BPTUHPT Indrapuri; q) BPTUHPT Siborongboron; r) BPTUHPT Padang Mangatas; s) BPTUHPT Sembawa; t) BPTUHPT Pelabuhan; u) BPTUHPT Denpasar. Untuk mendukung cakupan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Indonesia Timur, telah mendapat persetujuan untuk membentuk Loka Papua yang telah mulai dibangun pada tahun 2019.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Untuk mengikuti kebijakan tersebut maka Pejabat fungsional akan menggantikan para pejabat struktural eselon III dan eselon IV dilingkup Ditjen PKH. Penempatan pejabat fungsional tersebut disesuaikan menurut keahlian yang dibutuhkan pada masing-masing unit Eselon II.



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mempertimbangkan kerangka kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, serta kerangka kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah ditetapkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, disusunlah program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024, yaitu : “Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”, dengan sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak 4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024, diperlukan penetapan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan, strategi program dan kegiatan prioritas telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan arah kebijakan nasional, karena penentuan target kinerja telah mempertimbangkan adanya sumber dana baik dari APBN, APBD dan berbagai sumber dana lainnya.

4.1. TARGET KINERJA

Terdapat 11 indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diakhir periode 2020 – 2024. Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak



ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Target kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan hasil pendelegasian indikator kinerja Kementerian Pertanian.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, serta pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam sasaran program, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana secara tepat sasaran dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Ditjen PKH dapat berasal dari Pemerintah (APBN : RM, BLU, PNPB), dan sumber pendanaan lainnya yang berasal dari: Pemerintah Daerah (APBD), Swasta, BUMN/BUMD; investasi dalam negeri (PMDN), investasi dari luar negeri (PMA), Lembaga Keuangan dan Perbankan dan Swadaya Masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, proporsi APBN dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan pengungkit sumber pendanaan lainnya dalam mendukung target pembangunan nasional. Untuk sinergisme berbagai sumber pendanaan dalam kerangka pelaksanaan program sangat diperlukan. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 kerangka pendanaan tersebut disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Kegiatan	Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Produksi Pakan ternak	104.286	144.402	150.682	163.234	178.128
2	Pengendalian dan Penanggulang-an penyakit hewan	273.759	314.822	362.046	416.352	478.805
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1.136.874	1.358.053	1.501.005	1.674.350	1.851.718
4	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	34.949	46.540	53.344	61.259	70.481
5	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.619	73.177	85.042	87.858	90.761
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	422.810	428.321	433.969	439.759	445.694
Total		2.022.297	2.365.315	2.586.088	2.842.812	3.115.587

Pada tabel 4.1 nampak bahwa dana untuk penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak memegang porsi yang cukup besar diantara kegiatan-kegiatan program lainnya di Ditjen PKH.

Alokasi pendanaan tahun 2020 sesuai dengan alokasi yangg tertuang dalam DIPA, sedangkan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bersifat perkiraan kebutuhan dan akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana yang diperoleh dan pilihan prioritas kegiatan dalam mendukung sasaran program serta evaluasi program pada tahun sebelumnya. Pendanaan ini baru bersifat untuk kegiatan-kegiatan penting penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, belum mempertimbangkan kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi selama 2020-2024 memerlukan perhitungan tersendiri karena banyak variabel yang harus dipertimbangkan.

Rencana Kerja Tahunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Lampiran 2.





DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan keswan 5 tahun mendatang dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 terkait Sub Sektor Peternakan dan Keswan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan program sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung kinerja pembangunan peternakan dan keswan.

Diharapkan dokumen Renstra ini, menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik di pusat maupun daerah sehingga terwujud suatu sinergi kegiatan antara pusat dan daerah. Sinergi horisontal dan vertikal, baik di lingkungan Ditjen PKH, dengan Eselon I lingkup Kementan, dan Pemangku Kepentingan lainnya (Pemda, Masyarakat dan Swasta) sangat diperlukan untuk mewujudkan visi : ***“Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern.*”**

Penyusunan Renstra telah disusun sesuai Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan apabila diperlukan adanya perubahan Renstra Ditjen Peternakan dan Keswan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.







DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



PROYEKSI DAGING AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	41	1,16	43	45	47	50	53
Sumatera Utara	155	4,45	164	173	182	192	202
Sumatera Barat	60	1,70	63	66	70	73	77
Riau	109	3,11	115	121	127	134	141
Jambi	35	1,01	37	39	41	43	46
Sumatera Selatan	84	2,41	89	93	98	104	109
Bengkulu	8	0,24	9	9	10	10	11
Lampung	95	2,72	100	105	111	117	123
Kepulauan Bangka Belitung	26	0,74	27	29	30	32	34
Kepulauan Riau	26	0,74	27	29	30	32	34
DKI Jakarta	20	0,57	21	22	23	25	26
Jawa Barat	887	25,37	934	985	1.038	1.093	1.152
Jawa Tengah	665	19,02	700	738	778	820	864
DI. Yogyakarta	57	1,62	60	63	66	70	73
Jawa Timur	511	14,61	538	567	597	630	663
Banten	223	6,39	235	248	261	275	290
Bali	78	2,24	83	87	92	97	102
Nusa Tenggara Barat	41	1,18	44	46	48	51	54



lanjutan
PROYEKSI DAGING AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	20	0,56	21	22	23	24	26
Kalimantan Barat	56	1,61	59	62	66	69	73
Kalimantan Tengah	25	0,73	27	28	30	31	33
Kalimantan Selatan	95	2,71	100	105	111	117	123
Kalimantan Timur	55	1,58	58	61	64	68	72
Kalimantan Utara	5	0,15	5	6	6	6	7
Sulawesi Utara	10	0,29	11	11	12	13	13
Sulawesi Tengah	6	0,16	6	6	7	7	7
Sulawesi Selatan	84	2,39	88	93	98	103	109
Sulawesi Tenggara	5	0,13	5	5	5	6	6
Gorontalo	4	0,10	4	4	4	4	5
Sulawesi Barat	2	0,06	2	2	3	3	3
Maluku	1	0,02	1	1	1	1	1
Maluku Utara	0	0,01	0	0	0	0	0
Papua Barat	1	0,02	1	1	1	1	1
Papua	7	0,20	8	8	8	9	9
INDONESIA	3.495	100	3.683	3.881	4.090	4.310	4.541



PROYEKSI DAGING AYAM BURAS PEDAGING TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	12	3,97	12	12	12	12	12
Sumatera Utara	20	6,58	20	20	20	20	20
Sumatera Barat	5	1,66	5	5	5	5	5
Riau	3	1,02	3	3	3	3	3
Jambi	8	2,69	8	8	8	8	8
Sumatera Selatan	4	1,26	4	4	4	4	4
Bengkulu	4	1,49	4	4	4	4	4
Lampung	13	4,41	13	13	13	13	13
Kepulauan Bangka Belitung	1	0,47	1	1	1	1	1
Kepulauan Riau	1	0,48	1	1	1	1	1
DKI Jakarta	1	0,19	1	1	1	1	1
Jawa Barat	26	8,84	26	26	27	27	27
Jawa Tengah	31	10,44	31	31	31	31	31
DI. Yogyakarta	7	2,21	7	7	7	7	7
Jawa Timur	44	14,86	44	45	45	45	45
Banten	4	1,25	4	4	4	4	4
Bali	3	1,00	3	3	3	3	3
Nusa Tenggara Barat	12	4,04	12	12	12	12	12



lanjutan
PROYEKSI DAGING AYAM BURAS PEDAGING TAHUN 2020-2024
 (Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	12	3,94	12	12	12	12	12
Kalimantan Barat	3	1,06	3	3	3	3	3
Kalimantan Tengah	2	0,69	2	2	2	2	2
Kalimantan Selatan	3	1,04	3	3	3	3	3
Kalimantan Timur	5	1,74	5	5	5	5	5
Kalimantan Utara	1	0,39	1	1	1	1	1
Sulawesi Utara	3	0,91	3	3	3	3	3
Sulawesi Tengah	9	3,03	9	9	9	9	9
Sulawesi Selatan	36	11,89	36	36	36	36	36
Sulawesi Tenggara	11	3,68	11	11	11	11	11
Gorontalo	2	0,57	2	2	2	2	2
Sulawesi Barat	5	1,75	5	5	5	5	5
Maluku	0	0,11	0	0	0	0	0
Maluku Utara	1	0,35	1	1	1	1	1
Papua Barat	2	0,52	2	2	2	2	2
Papua	4	1,47	4	4	4	4	4
INDONESIA	299	100	299	300	300	301	301

PROYEKSI DAGING SAPI (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	12	2,42	10	10	11	11	14
Sumatera Utara	16	3,21	13	13	14	15	18
Sumatera Barat	21	4,22	17	18	18	19	24
Riau	10	2,04	8	8	9	9	11
Jambi	5	0,96	4	4	4	4	5
Sumatera Selatan	12	2,39	10	10	10	11	13
Bengkulu	3	0,64	3	3	3	3	4
Lampung	14	2,79	11	12	12	13	16
Kepulauan Bangka Belitung	3	0,66	3	3	3	3	4
Kepulauan Riau	1	0,24	1	1	1	1	1
DKI Jakarta	16	3,30	13	14	14	15	18
Jawa Barat	80	16,35	65	68	71	75	92
Jawa Tengah	66	13,38	54	56	58	61	75
DI. Yogyakarta	9	1,89	8	8	8	9	11
Jawa Timur	99	20,22	81	84	88	93	113
Banten	20	4,06	16	17	18	19	23
Bali	7	1,53	6	6	7	7	9
Nusa Tenggara Barat	10	2,00	8	8	9	9	11



lanjutan
PROYEKSI DAGING SAPI (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	12	2,43	10	10	11	11	14
Kalimantan Barat	6	1,13	5	5	5	5	6
Kalimantan Tengah	4	0,76	3	3	3	3	4
Kalimantan Selatan	7	1,49	6	6	6	7	8
Kalimantan Timur	8	1,65	7	7	7	8	9
Kalimantan Utara	1	0,13	1	1	1	1	1
Sulawesi Utara	4	0,72	3	3	3	3	4
Sulawesi Tengah	5	0,97	4	4	4	4	5
Sulawesi Selatan	21	4,23	17	18	18	19	24
Sulawesi Tenggara	6	1,28	5	5	6	6	7
Gorontalo	4	0,87	3	4	4	4	5
Sulawesi Barat	2	0,47	2	2	2	2	3
Maluku	2	0,41	2	2	2	2	2
Maluku Utara	1	0,22	1	1	1	1	1
Papua Barat	2	0,41	2	2	2	2	2
Papua	3	0,52	2	2	2	2	3
INDONESIA	490	100	400	416	434	459	560



PROYEKSI DAGING KERBAU (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	4	18,12	4	4	4	4	4
Sumatera Utara	2	7,41	2	2	2	2	2
Sumatera Barat	2	9,18	2	2	2	2	2
Riau	2	7,95	2	2	2	2	2
Jambi	2	6,68	1	2	2	2	2
Sumatera Selatan	1	3,05	1	1	1	1	1
Bengkulu	0	1,22	0	0	0	0	0
Lampung	0	0,42	0	0	0	0	0
Kepulauan Bangka Belitung	0	0,01	0	0	0	0	0
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	0	0,12	0	0	0	0	0
Jawa Barat	2	7,70	2	2	2	2	2
Jawa Tengah	2	6,62	1	2	2	2	2
DI. Yogyakarta	0	0,02	0	0	0	0	0
Jawa Timur	0	0,20	0	0	0	0	0
Banten	0	1,38	0	0	0	0	0
Bali	0	0,01	0	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	1	4,06	1	1	1	1	1



lanjutan
PROYEKSI DAGING KERBAU (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	2	6,32	1	1	1	2	2
Kalimantan Barat	0	0,18	0	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	0,37	0	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	1	2,62	1	1	1	1	1
Kalimantan Timur	0	0,20	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara	0	0,04	0	0	0	0	0
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	0	0,05	0	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	4	14,72	3	3	3	4	4
Sulawesi Tenggara	0	0,12	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0,02	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	0	0,86	0	0	0	0	0
Maluku	0	0,22	0	0	0	0	0
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Papua	0	0,12	0	0	0	0	0
INDONESIA	24	100	22	23	23	24	24

PROYEKSI DAGING KAMBING (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	3	4,03	2	2	2	2	2
Sumatera Utara	1	1,66	1	1	1	1	1
Sumatera Barat	1	1,16	1	1	1	1	1
Riau	1	1,16	1	1	1	1	1
Jambi	1	1,55	1	1	1	1	1
Sumatera Selatan	2	2,83	1	1	1	2	2
Bengkulu	0	0,16	0	0	0	0	0
Lampung	1	1,81	1	1	1	1	1
Kepulauan Bangka Belitung	0	0,13	0	0	0	0	0
Kepulauan Riau	0	0,45	0	0	0	0	0
DKI Jakarta	1	1,83	1	1	1	1	1
Jawa Barat	10	13,32	7	7	7	7	7
Jawa Tengah	12	16,15	8	8	8	9	9
DI. Yogyakarta	2	2,37	1	1	1	1	1
Jawa Timur	22	30,42	15	16	16	16	17
Banten	5	7,31	4	4	4	4	4
Bali	1	1,20	1	1	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	0	0,40	0	0	0	0	0



lanjutan
PROYEKSI DAGING KAMBING (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
 (Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	3	4,06	2	2	2	2	2
Kalimantan Barat	0	0,58	0	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	0,31	0	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	0,51	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur	1	0,88	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara	0	0,08	0	0	0	0	0
Sulawesi Utara	0	0,26	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	1	1,60	1	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	1	1,75	1	1	1	1	1
Sulawesi Tenggara	0	0,47	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0,44	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	0	0,30	0	0	0	0	0
Maluku	0	0,26	0	0	0	0	0
Maluku Utara	0	0,14	0	0	0	0	0
Papua Barat	0	0,10	0	0	0	0	0
Papua	0	0,33	0	0	0	0	0
INDONESIA	73	100	50	51	53	54	55

PROYEKSI DAGING DOMBA (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0	0,50	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	0	0,54	0	0	0	0	0
Sumatera Barat	0	0,04	0	0	0	0	0
Riau	0	0,03	0	0	0	0	0
Jambi	0	0,16	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0,33	0	0	0	0	0
Bengkulu	0	0,02	0	0	0	0	0
Lampung	0	0,04	0	0	0	0	0
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	0	0,27	0	0	0	0	0
Jawa Barat	62	68,44	45	47	50	52	55
Jawa Tengah	6	6,48	4	4	5	5	5
DI. Yogyakarta	3	3,21	2	2	2	2	3
Jawa Timur	7	8,15	5	6	6	6	7
Banten	10	11,38	7	8	8	9	9
Bali	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0	0,00	0	0	0	0	0



lanjutan
PROYEKSI DAGING DOMBA (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
 (Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	0	0,34	0	0	0	0	0
Kalimantan Barat	0	0,00	0	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	0	0,00	0	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	0	0,00	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0,00	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	0	0,02	0	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	0	0,04	0	0	0	0	0
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	91	100	66	69	73	77	81

PROYEKSI DAGING BABI (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0	0,06	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	54	24,09	37	38	39	40	41
Sumatera Barat	0	0,12	0	0	0	0	0
Riau	1	0,56	1	1	1	1	1
Jambi	0	0,12	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0,17	0	0	0	0	0
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
Lampung	1	0,38	1	1	1	1	1
Kepulauan Bangka Belitung	1	0,25	0	0	0	0	0
Kepulauan Riau	3	1,48	2	2	2	2	3
DKI Jakarta	7	3,10	5	5	5	5	5
Jawa Barat	1	0,51	1	1	1	1	1
Jawa Tengah	1	0,24	0	0	0	0	0
DI. Yogyakarta	0	0,22	0	0	0	0	0
Jawa Timur	4	1,60	2	3	3	3	3
Banten	4	1,83	3	3	3	3	3
Bali	49	21,78	34	34	35	36	37
Nusa Tenggara Barat	0	0,05	0	0	0	0	0



lanjutan
PROYEKSI DAGING BABI (MEATYIELD) TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	38	17,09	26	27	28	28	29
Kalimantan Barat	12	5,19	8	8	8	9	9
Kalimantan Tengah	2	0,68	1	1	1	1	1
Kalimantan Selatan	0	0,02	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur	1	0,55	1	1	1	1	1
Kalimantan Utara	0	0,19	0	0	0	0	0
Sulawesi Utara	26	11,45	18	18	19	19	19
Sulawesi Tengah	1	0,53	1	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	6	2,78	4	4	5	5	5
Sulawesi Tenggara	1	0,25	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0,01	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	1	0,32	0	1	1	1	1
Maluku	1	0,25	0	0	0	0	0
Maluku Utara	0	0,13	0	0	0	0	0
Papua Barat	1	0,45	1	1	1	1	1
Papua	8	3,55	5	6	6	6	6
INDONESIA	224	100	155	158	162	166	170



PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0	0,01	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	2	0,22	2	2	2	3	3
Sumatera Barat	1	0,11	1	1	1	1	1
Riau	0	0,01	0	0	0	0	0
Jambi	0	0,00	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	0	0,01	0	0	0	0	0
Bengkulu	1	0,06	1	1	1	1	1
Lampung	1	0,12	1	1	1	1	1
Kepulauan Bangka Belitung	0	0,04	0	0	1	1	1
Kepulauan Riau	0	0,00	0	0	0	0	0
DKI Jakarta	5	0,53	6	6	6	6	7
Jawa Barat	352	35,31	368	384	402	420	439
Jawa Tengah	101	10,12	105	110	115	120	126
DI. Yogyakarta	6	0,57	6	6	7	7	7
Jawa Timur	523	52,50	547	571	597	624	652
Banten	0	0,01	0	0	0	0	0
Bali	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-



lanjutan
PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	0	0,00	0	0	0	0	0
Kalimantan Barat	0	0,01	0	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	0	0,02	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0,02	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	0	0,00	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	3	0,33	3	4	4	4	4
Sulawesi Tenggara	0	0,01	0	0	0	0	0
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	996	100	1.041	1.088	1.137	1.188	1.242

PROYEKSI PRODUKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	9	2,81	9	10	10	10	11
Sumatera Utara	14	4,33	14	15	15	16	16
Sumatera Barat	6	1,91	6	7	7	7	7
Riau	2	0,58	2	2	2	2	2
Jambi	5	1,56	5	5	6	6	6
Sumatera Selatan	15	4,66	15	16	16	17	18
Bengkulu	1	0,21	1	1	1	1	1
Lampung	6	1,82	6	6	6	7	7
Kepulauan Bangka Belitung	1	0,22	1	1	1	1	1
Kepulauan Riau	0	0,04	0	0	0	0	0
DKI Jakarta	0	0,05	0	0	0	0	0
Jawa Barat	62	19,24	64	66	68	70	73
Jawa Tengah	36	11,27	37	39	40	41	43
DI. Yogyakarta	2	0,72	2	2	3	3	3
Jawa Timur	40	12,52	42	43	44	46	47
Banten	13	4,17	14	14	15	15	16
Bali	2	0,57	2	2	2	2	2
Nusa Tenggara Barat	5	1,70	6	6	6	6	6



lanjutan
PROYEKSI PRODUKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	2	0,48	2	2	2	2	2
Kalimantan Barat	3	0,92	3	3	3	3	3
Kalimantan Tengah	2	0,52	2	2	2	2	2
Kalimantan Selatan	29	9,17	30	31	32	34	35
Kalimantan Timur	1	0,43	1	1	2	2	2
Kalimantan Utara	0	0,03	0	0	0	0	0
Sulawesi Utara	1	0,31	1	1	1	1	1
Sulawesi Tengah	6	1,75	6	6	6	6	7
Sulawesi Selatan	48	14,91	49	51	53	54	56
Sulawesi Tenggara	3	1,08	4	4	4	4	4
Gorontalo	0	0,13	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	2	0,72	2	2	3	3	3
Maluku	2	0,68	2	2	2	2	3
Maluku Utara	0	0,11	0	0	0	0	0
Papua Barat	1	0,19	1	1	1	1	1
Papua	1	0,18	1	1	1	1	1
INDONESIA	321	100	332	343	354	366	378

PROYEKSI PRODUKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	12	0,26	13	13	13	13	14
Sumatera Utara	512	10,78	523	533	543	554	565
Sumatera Barat	284	5,98	290	295	301	307	313
Riau	12	0,26	12	13	13	13	13
Jambi	23	0,48	23	24	24	25	25
Sumatera Selatan	137	2,88	140	142	145	148	151
Bengkulu	11	0,23	11	11	11	12	12
Lampung	131	2,75	133	136	139	141	144
Kepulauan Bangka Belitung	11	0,22	11	11	11	11	12
Kepulauan Riau	14	0,29	14	15	15	15	15
DKI Jakarta	40	0,83	40	41	42	43	44
Jawa Barat	441	9,28	450	459	468	477	486
Jawa Tengah	500	10,51	510	520	530	540	551
DI. Yogyakarta	63	1,32	64	65	67	68	69
Jawa Timur	1.632	34,34	1.665	1.698	1.731	1.765	1.800
Banten	192	4,05	196	200	204	208	212
Bali	186	3,92	190	194	198	201	205
Nusa Tenggara Barat	34	0,71	35	35	36	37	37



lanjutan
PROYEKSI PRODUKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024
 (Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	9	0,19	9	10	10	10	10
Kalimantan Barat	115	2,43	118	120	122	125	127
Kalimantan Tengah	7	0,16	8	8	8	8	8
Kalimantan Selatan	87	1,83	88	90	92	94	96
Kalimantan Timur	33	0,70	34	35	35	36	37
Kalimantan Utara	1	0,01	1	1	1	1	1
Sulawesi Utara	27	0,56	27	28	28	29	29
Sulawesi Tengah	14	0,29	14	14	15	15	15
Sulawesi Selatan	197	4,15	201	205	209	213	217
Sulawesi Tenggara	3	0,06	3	3	3	3	3
Gorontalo	4	0,08	4	4	4	4	4
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	1	0,01	1	1	1	1	1
Maluku Utara	0	0,00	0	0	0	0	0
Papua Barat	8	0,17	8	9	9	9	9
Papua	12	0,26	12	13	13	13	13
INDONESIA	4.753	100	4.847	4.943	5.041	5.141	5.242

PROYEKSI PRODUKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024
(Ribuan Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	2	1,09	2	3	3	3	3
Sumatera Utara	14	6,15	14	15	15	16	16
Sumatera Barat	3	1,17	3	3	3	3	3
Riau	15	6,88	16	16	17	18	18
Jambi	8	3,71	8	9	9	9	10
Sumatera Selatan	8	3,66	8	9	9	9	10
Bengkulu	1	0,68	2	2	2	2	2
Lampung	9	4,05	9	10	10	10	11
Kepulauan Bangka Belitung	2	0,97	2	2	2	2	3
Kepulauan Riau	1	0,40	1	1	1	1	1
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	18	7,99	18	19	20	20	21
Jawa Tengah	33	14,86	34	35	37	38	39
DI. Yogyakarta	2	1,05	2	2	3	3	3
Jawa Timur	21	9,35	21	22	23	24	25
Banten	14	6,49	15	15	16	17	17
Bali	1	0,59	1	1	1	1	2
Nusa Tenggara Barat	4	1,70	4	4	4	4	4



lanjutan
PROYEKSI PRODUKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024
(Ribu Ton)

Provinsi	Tahun						
	2019	share (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	5	2,12	5	5	5	5	6
Kalimantan Barat	3	1,59	4	4	4	4	4
Kalimantan Tengah	2	1,11	3	3	3	3	3
Kalimantan Selatan	8	3,64	8	9	9	9	10
Kalimantan Timur	3	1,37	3	3	3	3	4
Kalimantan Utara	1	0,30	1	1	1	1	1
Sulawesi Utara	2	0,94	2	2	2	2	2
Sulawesi Tengah	3	1,54	4	4	4	4	4
Sulawesi Selatan	21	9,68	22	23	24	25	26
Sulawesi Tenggara	7	3,00	7	7	7	8	8
Gorontalo	1	0,35	1	1	1	1	1
Sulawesi Barat	3	1,43	3	3	4	4	4
Maluku	2	0,84	2	2	2	2	2
Maluku Utara	0	0,19	0	0	0	0	1
Papua Barat	1	0,42	1	1	1	1	1
Papua	1	0,68	2	2	2	2	2
INDONESIA	220	100	228	237	246	255	264



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT													
Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak													
	Produksi daging	Ribu Ton	4.499,32	4.714,88	4.939,55	5.177,04	5.439,29	5.786,62					
	Produksi susu	Ribu Ton	996,44	1.041,31	1.088,20	1.137,20	1.188,41	1.241,93					
	Produksi telur	Ribu Ton	5.355,66	5.470,94	5.588,88	5.709,57	5.833,06	5.959,43					
	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan												
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	284.349 ton	25	33,75	47,25	68,51	137,03					
	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak												
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	80	81,5	82	82,5	83	83,5					
	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan												
	Indeks ketersediaan sarana peternakan yang sesuai peruntukan	Indeks	15,7	17,7	20,9	25,4	31,2	38,4					

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis													
	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80	80	80,5	80,5	81	81					
Terkendalnya kasus zoonosis pada manusia													
	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	%	125	127	125	123	121	119					
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	22,01	22,43	22,64	22,85	23,06	23,27					



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tingkat kepuasan layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3,4	3,57	3,58	3,59	3,59	3,6						
	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas													
	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85						
Peningkatan Produksi Pakan Ternak									104.286	144.402	150.682	163.234	178.128	
	Terpenuhinya pakan ternak sesuai kebutuhan													
	Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi	Ton		28.107.952	28.969.789	29.857.247	30.772.180	31.740.416						
	Jumlah pakan ternak kerbau untuk produksi	Ton		1.900.856	1.879.107	1.857.358	1.837.784	1.816.035						
	Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi	Ton		6.732.648	6.820.712	6.910.611	7.001.983	7.095.191						
	Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi	Ton		11.681.671	12.440.667	13.248.976	14.109.804	15.026.565						

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pakan ternak ayam lokal untuk produksi	Ton		1.859.579	1.907.002	1.955.635	2.005.502	2.056.650					
	Jumlah pakan ternak itik untuk produksi	Ton		1.347.596	1.389.613	1.432.991	1.477.818	1.524.112					
	Jumlah pakan ternak babi untuk produksi	Ton		117.053	147.053	187.053	227.053	267.053					
	Terpenuhiya pakan ternak perah sesuai kebutuhan												
	Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing)	Ton		19.758.756	19.808.756	19.858.756	19.908.756	19.958.756					
	Terpenuhiya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan												
	Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur	Ton		1.162.716	1.212.716	1.262.716	1.312.716	1.362.716					
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan													
	Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan								273.759	314.822	362.046	416.352	478.805
	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan erhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan: penolakan : kesehatan hewan)	%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak per negara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)	%		0	0	0	0	0	0					
	Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan)	%		0	0	0	0	0	0					
	Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi	%	2	4	4	3	3	2						
	Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau	%		4	4	3	3	2						

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing	%		4	4	3	3	2						
	Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba	%		4	4	3	3	2						
	Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam	%		4	4	3	3	2						
	Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik	%		4	4	3	3	2						
	Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%		4	4	3	3	2						
	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis													



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesehatan ternak perah													
	Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah	%		4	4	3	3	2					
Meningkatnya kesehatan ayam petelur													
	Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur	%		4	4	3	3	2					
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak													
	Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor								1136.874	1.358.053	1.501.005	1.674.350	1.851.718
Meningkatnya ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak)													
	Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak)	%		20	20	15	15	15					

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhi populasi ternak sesuai kebutuhan													
	Jumlah populasi ternak sapi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.484.320	3.592.674	3.701.028	3.809.382	3.917.736						
	Jumlah populasi ternak kerbau potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	148.056	152.660	157.264	161.868	166.472						
	Jumlah populasi ternak kambing potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	6.959.631	7.176.059	7.392.486	7.608.914	7.825.341						
	Jumlah populasi ternak domba potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	9.024.344	9.304.979	9.585.614	9.866.249	10.146.884						
	Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	267.935.428	267.935.428	267.935.428	267.935.428	267.935.428						
	Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	30.770.385	31.727.269	32.684.153	33.641.037	34.597.921						
	Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.028.023	4.153.285	4.278.547	4.403.809	4.529.070						



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan													
	Jumlah bibit ternak sapi potong yang diajukan	Ekor		5.263.985	5.395.584	5.530.474	5.668.736	5.810.454					
	Jumlah bibit ternak kerbau potong yang diajukan	Ekor		344.957	347.545	350.151	352.777	355.423					
	Jumlah bibit ternak kambing potong yang diajukan	Ekor		5.716.524	5.740.361	5.764.297	5.788.333	5.812.470					
	Jumlah bibit ternak domba potong yang diajukan	Ekor		5.455.320	5.574.902	5.697.105	5.821.987	5.949.606					
	Jumlah bibit ternak ayam yang diajukan	Ekor		17.350.891	17.890.461	18.430.031	18.969.602	19.509.172					
	Jumlah bibit ternak itik yang diajukan	Ekor		190.883	196.819	202.755	208.691	214.627					
	Jumlah bibit ternak babi potong yang diajukan	Ekor		802.449	827.404	852.358	877.312	902.266					
Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan													
	Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%		90	90	90	90	90					

Rencana Kerja Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan	%		90	90	90	90	90					
	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu												
	Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%		70	75	80	85	90					
	Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional												
	Produksi Susu	Ton		1.041.310	1.088.200	1.137.200	1.188.410	1.241.930					
	Jumlah Populasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor		586.000	614.000	645.000	681.000	721.000					
	Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional												
	Produksi Telur	Ton		4.795.165	4.896.101	4.996.643	5.096.696	5.198.982					
	Jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor		267.935.428	273.552.827	279.170.226	284.760.370	290.475.270					



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)													
Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk													
Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk)													
Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat													
Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong													

Rencana Kerja Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong	%		48,3	55,8	59,5	65,1	68,8					
	Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong	%	1,7	6,7	11,7	16,7	21,7	26,7					
	Tersedianya sarana pasca panen peternakan sesuai peruntukkan												
	Indeks ketersediaan sarana pasca panen peternakan yang memenuhi persyaratan	%	15,7	17,7	20,9	25,4	31,2	38,4					
	Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional												
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%		81,5	82	82,5	83	83,5					
	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia												



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	128	127	125	123	121	119						
	Meningkatnya produk susu dan telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat													
	Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan	%	88	88,2	88,5	89	89,2	89,5						
	Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan	%	95	95,2	95,5	95,7	96	96,2						
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak									34.949	46.540	53.344	61.259	70.481	
	Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan													
	Jumlah ekspor hewan hidup	Ton	22.885	25.631	30.757	41.523	60.208	79.474						
	Jumlah ekspor produk pangan segar dan olahan	Ton	107.722	120.649	144.778	195.451	283.404	374.093						
	Jumlah ekspor produk non pangan	Ton	57.589	64.500	77.400	104.489	151.510	199.993						

Rencana Kerja Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah ekspor obat hewan	Ton	616	690	828	1.118	1.621	2.139						
	Jumlah ekspor benih dan bibit ternak	Ton	147	165	198	267	387	510						
	Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,49	1,88	2,59	3,64	4,26	5,14						
	Tersedianya sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan													
	Indeks ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang sesuai peruntukkan	%	5,6	6,68	8,25	9,81	11,38	12,94						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan									422.810	428.321	433.969	439.759	445.694	
	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													



Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	22,01	22,43	22,64	22,85	23,06	23,27					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3,4	3,57	3,58	3,59	3,59	3,6					
Terkelolanya Anggaran Ditjen Pernakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas													
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK yang berlaku)	Nilai	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85					
Penyediaan benih dan bibit ternak									42.108	50.530	60.636	72.763	87.316
Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBIP Singosari													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBIB Singosari	Skala Likert (1 - 4)		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3					

Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pendapatan BLU BBIB Singosari													
	Jumlah penerimaan BLU BBIB Singosari	Juta Rupiah		24.000	26.000	26.500	27.000	27.500					
Meningkatnya produksi Semen Beku													
	Produksi semen beku APBN/BLU	Dosis		3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.325.000	3.500.000					



LAMPIRAN 2





**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pertanian Gedung C

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan,
Jakarta 12550

Telp. : (021) 7815380-4

Fax. : (021) 7815486-7815586

website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>